



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Gaya Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Taja Indah

Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin

Oleh :

Dodi Susanto*¹, Supardi²

Email : supardi@unitaspalembang.ac.id

ABSTRAK

Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut dengan kampung atau dusun atau banjar atau jorong. Fungsi utama Kepala desa selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Maka secara filosofi pemerintah desa tidak hanya perlu diperkuat dengan aspek sarana dan prasarana, sistem administrasi, keuangan dan wewenang saja namun tidak kalah pentingnya adalah daya dukung kepemimpinan Kepala desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Kepemimpinan (leadership) dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin (leader) dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-unsur didalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan pelayanan pada masyarakat dengan maksimal. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **Gaya Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Taja Indah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Gaya Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Taja Indah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode kuisioner.

Kata kunci : Gaya kepemimpinan, Pemerintahan, Desa.



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

1 Latar Belakang Masalah

Organisasi menemui banyak tantangan kompleks baik dari internal maupun eksternal, khususnya pada kebutuhan unit organisasi untuk mengelola talenta supaya organisasi bisa berjalan dengan baik. Pada pokok daya individu terjalin dari pemimpin dan pekerja. Guna menciptakan aktivitas tugas karyawan yang baik, dibutuhkan beragam kebiasaan yang bisa dilaksanakan sosok pemimpin dalam pemerintahan, yakni memanfaatkan gaya kepemimpinan dengan tepat. Gaya kepemimpinan secara efektif diperlukan pemimpin agar bisa menaikkan kinerja seluruh karyawan untuk mewujudkan sebuah tujuan organisasinya menjadi instansi yang mampu melayani publik. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan bisa dijadikan panduan secara baik untuk menaikkan kinerja pegawainya. Pemimpin memiliki fungsi dalam instansi yakni membimbing, menuntun, memberi maupun menstimulasi berbagai motivasi kerja, membangun jejaringan komunikasi secara baik, melakukan pengawasan dengan efisien serta mendorong pengikut menuju sasaran sebagaimana hendak dicapai, mengacu pada ketetapan waktu serta perencanaannya. Kepemimpinan adalah sesuatu kompleks, penuh dengan kejutan dan tantangan. Akan tetapi, pemimpin menghadapi semua tantangan tersebut bersama dengan tim dalam organisasinya. Menjadi suatu organisasi administratif yang memiliki tanggung jawab dalam melayani masyarakat dengan penuh dinamika membuat desa menemui berbagai masalah yang mayoritas bersifat manajerial dibandingkan dengan masalah-masalah yang bersifat politis. Memahami keberadaan desa sebagai perangkat daerah yang terdapat pada wilayah kelurahan membuahkan kepala desa sebagai kepala pemerintah desa memiliki tanggung jawab pada keterlaksanaan program pemerintahan desa. Dalam hal ini, kewenangan dan tugas kepala desa menjumpai berbagai tantangan dalam pengadaan



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

pembangunan, pemerintahan, ataupun pembinaan kesejahteraan Masyarakat dengan tugas pelayanan dimana menjadi wajib dilakukan dengan baik, sebab kinerja desa memiliki pengaruh secara umum pada kinerja organisasi perangkat daerah lainnya. Dapat dipahami kepala desa memiliki serangkaian wewenang dan tugas yang wajib dilaksanakan yang mana telah ditetapkan dalam PP No. 11 tahun 2019 mengenai Desa.

Desa ialah organisasi perangkat daerah di daerah Kelurahan atau Kecamatan yang diketuai oleh sosok Kepala desa. Beliau berkewewenangan dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan urusan pemerintahan, kebutuhan warga daerahnya sesuai dengan Prakarsa Masyarakat, hak asal-usul maupun hal tradisional sebagaimana dihargai dan diakui system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun desa menjadi aglomerasi permukiman di daerah pedesaan (rural). Sebuah desa ialah sekumpulan dari beberapa unit permukiman yang dikenal dengan dusun atau kampung atau jorong atau banjar. Fungsi utama Kepala desa tidak hanya melayani Masyarakat saja, namun juga melaksanakan tugas-tugas pembinaan wilayah. Dengan demikian, secara filosofi pemerintah desa selain membutuhkan penguatan pada faktor sarana dan prasarana, sistem administrasi, keuangan, dan wewenang saja, tetapi juga memerlukan daya dukung kepemimpinan kepala desa pada pelaksanaan pemerintah desa.

Kepemimpinan (*leadership*) ialah suatu cara dari seorang pemimpin (*leader*) untuk memberi arahan, dorongan, dan pengelolaan pada semua unsur-unsur di dalam suatu organisasi maupun kelompok guna mencapai tujuan organisasi yang diharapkan sehingga bisa mewujudkan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Melalui peningkatan mutu pelayanan artinya sudah terwujudnya hasil kinerja dari individu maupun aparatur desanya guna mencapai tujuan yang



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

ditetapkan. Kepemimpinan sebenarnya tidak ditetapkan berdasarkan jabatan ataupun pangkat seseorang. Kepemimpinan ialah segala sesuatu yang hadir dari dalam serta merupakan hasil dari keputusan individu menjadi pemimpin untuk diri, lingkungan pekerjaan, keluarga, ataupun untuk sosial atau untuk negeri. Kepemimpinan adalah salah satu fungsi yang berperan penting pada manajemen. Kemampuan seseorang dalam memimpin secara efisien merupakan sebuah kunci agar bisa menyelenggarakan semua unsur-unsur manajemen dengan baik. Pemimpin wajib melakukan seluruh fungsi peranannya guna mengolaborasikan SDM dengan sumber daya lainnya untuk mewujudkan tujuannya. Poin utama dalam melaksanakannya adalah dengan keberadaan peran yang jelas serta wewenang dalam rangka mendukung tindakan-tindakan kepemimpinan.

Kata pemimpin menurut sebagian besar orang ialah sosok yang mempunyai komando serta kewenangan yang absolut untuk memberikan perintah yang harus dilaksanakan para bawahannya. Pada dasarnya, inti dari kepemimpinan ialah kesediaan orang-orang untuk mengikutinya. Hal ini berarti, kesukarelaan serta keinginan orang-orang di sekitarnya menjadikannya seorang pemimpin. Dengan kata lain, seorang pemimpin wajib mempunyai daya tarik dan daya ikat guna mempengaruhi orang-orang di sekitarnya agar mau bahkan termotivasi untuk mengikuti permintaan dan arahnya. Di sisi lain, anggota organisasi dan orang-orang akan memiliki kecenderungan untuk mengikuti seseorang yang dianggap bisa menyediakan alat guna mencapai keinginan dan kebutuhan mereka. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang tidak mempunyai wewenang ataupun jabatan tinggi bisa menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diambil Kesimpulan bahwa fungsi dari kepemimpinan ialah hal yang luas dan tidak berujung hanya pada komando saja, namun juga pada banyak aspek dan konteks pendukung yang menyelimutinya.



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Firmansyah & Mahardhika (2018, hlm. 195) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah bagian dari fungsi manajemen guna memberikan pengaruh, arahan, serta motivasi dan pengawasan terhadap orang lain supaya bisa melaksanakan berbagai tugas yang sudah diatur dengan demikian menjadi sasaran maupun tujuan organisasi dapat tercapai. Memimpin artinya memberi bimbingan, tuntunan, arahan, dan mendahului, bukan hanya memberikan perintah saja. Di sisi lain, Robbins (dalam Sadikin, 2020, hlm. 116) mengartikan kepemimpinan yakni kemampuan seseorang dalam memberi pengaruh pada suatu kelompok menuju tercapainya suatu sasaran/tujuan. Hal ini berarti seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi, tidak hanya mengarahkan atau memerintah secara langsung guna mencapai tujuan.

John C. Maxwell seorang ahli kepemimpinan, membedakan tahapan kepemimpinan ke dalam lima tingkatan yang perlu dilalui pemimpin pada organisasinya.

1. Tingkat Posisi (Kepemimpinan Diri – Posisi)

Kepemimpinan pada level pertama ini, orang-orang mematuhi atau mengikuti seseorang ialah suatu keharusan tanpa ada opsi lain. Hal ini disebabkan seseorang mempunyai posisi atau kedudukan sebagai seorang atasan. Kepemimpinan level 1 ialah tingkatan terbaik dalam memulai, namun bukan merupakan posisi yang baik untuk menetap. Sebab, saat komitmen tim rendah maka energinya juga akan rendah. Organisasi yang hebat tidak dapat dibangun hanya dengan kepemimpinan level 1. Umumnya, anggota organisasi akan melakukan kerja berdasarkan keharusan. Seorang pemimpin anggota tidak dapat mewujudkan apa saja saat motivasi anggota rendah atau seadanya.



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

2. Tingkat Hubungan (Izin)

Dalam level ini, orang-orang akan mematuhi seorang pemimpin sebab mereka menginginkan dan menikmatinya. Orang-orang akan bahagia bekerja dengan pemimpin tersebut dan berada dalam timnya. Motivasi anggota akan mengalami peningkatan yang signifikan disbanding dengan level 1. Motivasi erat kaitannya dengan hubungan yang baik. Apabila pemimpin senang dengan anggotanya dan memiliki kepedulian pada mereka, maka kerja sama antara anggota dan pemimpin bisa terlaksana dengan baik. Pemimpin level 2 ini melaksanakan hal-hal di bawah ini dengan baik:

- a. Menjadi pendengar yang baik. Poin ini penting sebab agar dapat menjadi pemimpin yang baik, maka pemimpin harus memahami dan mengenal setiap karakter anggota timnya.
- b. Melakukan observasi dengan baik. Pemimpin pada level 2 melakukan observasi terhadap anggotanya dengan baik. Tidak hanya mendengar pernyataan dari anggotanya, namun juga mengamati sesuatu yang sudah dilaksanakan anggotanya. Hal ini berkaitan dengan budaya yang dibentuk berdasarkan sesuatu yang dilakukan dan apa yang ditetapkan akan menentukan sesuatu yang akan dicapai.
- c. Memberi pelayanan yang baik. Pemimpin bisa berjalan berdampingan dengan anggotanya serta saling memberi bantuan. Pemimpin di level ini tidak hanya mencapai puncak gunung seorang diri, namun juga membawa serta anggotanya.

3. Pencapaian Tingkat (Kepemimpinan Produksi)



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Dalam level ketiga, pemimpin mendapatkan kepercayaan dan bisa memberi pengaruh sebab memiliki produktivitas yang baik. Jumlah dan segala sesuatu yang sudah dilakukan pemimpin bagi anggota dan organisasinya membuat kredibilitas pemimpin tersebut terbangun sebab prestasinya. Pemimpin level 3 melaksanakan 3 perihal berikut secara baik yakni:

- a. sebagai contoh. Orang cenderung ikut pada sesuatu yang dilihatnya. Kepemimpinan ialah perihal “visual”. Orang-orang mengikuti yang pemimpin lakukan dan bukan lagi hanya pada perkataan. Pemimpin layaknya *tour guide* yang pergi dengan anggota tim dan tidak hanya seperti agen travel dengan tugas mengantar individu ke lokasi yang belum pernah didatanginya.
- b. Mempunyai kekuatan momentum. Seseorang bisa menciptakan momentumnya berdasarkan prestasi. Saat seseorang memperoleh prestasi yang baik, komitmen akan mengalami peningkatan dan sejalan dengan hal ini hasil yang didapat juga akan meningkat.
- c. Menarik orang terbaik. Pemimpin di level ini layaknya magnet yang bisa menarik orang-orang kompeten. Jika seorang pemimpin memiliki pemikiran yang positif, jujur, dan pekerja keras maka bisa memperoleh pegawai yang seperti itu pula.

4. Level Mengembangkan Tim (Pengembangan Orang – Reproduksi)

Dalam level 4, orang-orang mengikuti pemimpin karena sesuatu yang sudah dilakukan pemimpin itu pada mereka. Pemimpin mengembangkan tim dan membantu mereka menjadi sukses dan lebih baik. Pemimpin bisa menjadi orang berpengaruh dan sukses bukan karena kekuasaannya, tetapi sebab kemampuannya dalam memberdayakan pegawai. *Pemimpin menciptakan pemimpin.*



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Hal ini berarti pemimpin sukses yakni pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru dalam organisasinya.

5. Kepribadian Tingkat (Pinnacle – Rasa Hormat)

Kepemimpinan pada level ini berbeda dengan level 1 yang cenderung hanya pemberian, namun layaknya anugerah. Maxwell menjelaskan bahwa sedikit orang yang bisa mencapai level ini. Contoh kepemimpinan pada level ini ialah yang dicontohkan Nabi dan Rasul. Selanjutnya Griffin (dalam Sadikin, 2020, hlm. 116) menjelaskan kepemimpinan ialah memanfaatkan pengaruh tanpa ada paksaan guna mewujudkan tujuan-tujuan organisasi, memotivasi perilaku menuju tujuan tersebut serta membantu memahami budaya organisasi. Oleh karenanya, perintah dan arahan dari pemimpin wajib dilaksanakan tanpa paksaan bahkan harus ada rasa rela dan ikhlas yang tumbuh sendiri dari anggota yang diperintah.

Kesimpulannya yakni kepemimpinan merupakan fungsi dari manajemen yang memberi pengaruh, arahan, dan motivasi serta pengawasan terhadap anggota sebuah organisasi maupun kelompok tertentu guna menggapai tujuan yang sudah ditentukan tanpa adanya keterpaksaan, melainkan diperoleh sendiri sebab anggota merasa tergerakkan, termotivasi, dan terpengaruhi untuk melaksanakan demi ketercapaian tujuan bersama.

Efektivitas adalah faktor pokok aktivitas organisasi untuk menggapai sasaran atau tujuan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan aspek kesuksesan ketercapaian tujuan, maka efektivitas ialah menempatkan fokus di level ketercapaian dari tujuan organisasinya. Kemudian mengacu pada ketepatan waktu, maka efektivitas merupakan terwujudnya beragam tujuan sebagaimana sudah



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

ditetapkan tepat pada waktu yang ditentukan melalui penggunaan berbagai sumber yang telah dialokasikan guna menjalankan aktivitas. Pemerintah yang bersih serta baik harus sesuai dengan kriteria efisien serta efektif yakni memiliki daya guna maupun memberikan hasil-guna. Kriteria keefektifan umumnya didasarkan pada parameter produk untuk menjangkau seluas-luasnya kebutuhan masyarakat dari beragam lapisan sosial dan kelompok. Supaya suatu pemerintahan efektif dan efisien, pejabat-pejabat pemerintahan wajib bisa mendesain berbagai perencanaannya sejalan terhadap keperluan warga serta dibuat dengan rasional maupun empiris. Melalui perencanaan dengan rasional, harapan keikutsertaan masyarakat bisa digerakkan secara mudah sebab berbagai programnya sebagai elemen keperluan masyarakat itu sendiri. Langkah-langkah pemerintah dan lembaga memberikan hasil yang mengacu pada apa yang dibutuhkan masyarakatnya serta memanfaatkan berbagai sumber daya dengan semaksimalnya.

Kata “efektif” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar “efektif” artinya memiliki efek (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) sukses memperoleh keberhasilan. Sementara, menurut istilah efektivitas adalah sebuah hasil ketercapaian tujuan yang sudah diupayakan. Supardi memaparkan bahwa kombinasi yang terbentuk melalui manusiawi, .

Efektivitas pembelajaran ditinjau melalui ukuran ketercapaian terhadap interaksinya dari pendidik bersama peserta didik pada sebuah situasi edukatif untuk mewujudkan ntujuan pembelajarannya. Hal itu menjadi ukuran produktivitas dengan mengarah pada ketercapaian pekerjaan terkait pada kuantitas, kualitas, maupun waktu. Selain itu, efektivitas dijadikan tolak ukur sesuai dengan sejauh manakan ketercapaiannya diwujudkan. Tingginya pencapaian menentukan keefektifannya juga meningkat. Jika ditinjau, mencakup pengertian efektivitas,



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

mengubah sikap menuju arah lebih baik serta positif terhadap perbedaan dan potensi supaya dapat menggapai pembelajaran menjadi efektif. Maka efektif di sini ialah ketercapaian dari apa yang diharapkan masing-masing. Terdapat beberapa pendapat dari ahli mengenai definisi efektivitas, yaitu:

1. Nana Sudjana mengartikan efektivitas adalah sebuah jalan menuju kesuksesan yang dilakukan oleh peserta didik guna menggapai tujuan yang diinginkan.
2. Ravianto memaparkan efektivitas merupakan suatu hal yang menjadi ujung tombak Ketika melakukan pengukuran terhadap baik maupun tidaknya sebuah pekerjaan yang sudah dikerjakan. Pekerjaan telah dilakukan dengan efektif jika sudah sesuai dengan konsep sudah didesain dari aspek biaya, waktu, dan kualitasnya.
3. Kusuma berpendapat bahwa efektivitas ialah suatu ukuran supaya menyatakan bahwa target yang diharapkan sesuai dengan yang telah diinginkan saat mencapai tujuan pembelajaran.
4. Alisman menjelaskan efektivitas ialah sebuah kondisi saat tujuan yang diharapkan atau diinginkan sejalan dengan yang sudah direncanakan yang sudah ditetapkan, yakni saat tolok ukur keberhasilan sebuah rancangan yang telah disusun yakni ketika sudah mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, penulis menyimpulkan efektivitas merupakan sebuah kegiatan yang mana adalah hasil dari keputusan tujuan atau target dari sebuah peristiwa yang sudah direncanakan dan disusun supaya bisa mencapai sesuai keinginan. Jika telah dilaksanakan sejalan dengan sasaran yang sudah direncanakan artinya semakin efektif.

Efektivitas pada sebuah program bisa ditinjau dari beberapa aspek, yakni seperti di bawah:



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

1. Aspek Ketentuan dan Pengaturan. Pengaturan disusun guna mempertahankan suatu perkembangan pada keberlangsungan suatu aktivitas yang dilaksanakan supaya aktivitas bisa terlaksana mengacu apa yang menjadi harapan. Pada aspek ini ada bermacam-macam regulasi langsung terhadap Pendidikan ataupun peserta didik. Jika regulasi tersebut terlaksana secara baik artinya keefektifannya meningkat.
2. Aspek Fungsi dan Tujuan; Jika sebuah karakter maupun sebuah instansi pembelajaran bisa disebut keefektifan apabila bisa menjalankan fungsi serta tugasnya secara baik. Oleh karenanya tiap individu maupun kelompok wajib mengerti fungsi serta tujuannya secara baik mengacu pada yang telah disusun.
3. Aspek Rencana atau Program ; Apabila akan melaksanakan sebuah rencana tentu sudah memiliki program. Apabila tidak ada rencana, artinya sebuah tujuan bisa tidak terlaksana sesuai yang diharapkan. Maka dari itu, kegiatan bisa berjalan efektif jika sudah memiliki susunan rencana yang sudah terprogram.
4. Aspek Keadaan Ideal dan Tujuan; Hal ini menjadi sasaran yang diharapkan dengan mengarahkan hasil prosesnya sejalan dengan yang sudah direncanakan guna menggapai suatu tujuan yang sudah ditargetkan.

Berdasarkan definisi tersebut, bisa disimpulkan yaitu efektivitas didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang memiliki hasil terhadap tujuan yang sudah disusun serta didesain mengacu pada harapan. Jika tujuannya mengarah pada suatu keberhasilan artinya semakin tinggi keefektivitasan yang sudah dicapai. Proses-proses serta lembaga-lembaga memproduksi hasil sesuai yang sudah direncanakan melalui sumber-sumber yang sudah ada dengan baik. Asas efisiensi secara general diukur melalui rasio biaya Pembangunan dalam pemenuhan



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

kebutuhan seluruh masyarakat. Semakin kecil biaya yang dipakai untuk kebutuhan terbesar, artinya pemerintah ini masuk pada kategori pemerintahan yang efisien. Pemerintahan pusat ataupun daerah dalam periode yang terus mengukur dukungan strukturnya, membuat perbaikan structural sejalan terhadap tuntutan dari perubahan misalnya merancang ulang struktur lembaga dengan menyeluruh, melakukan penyusunan fungsi dan jabatan yang sesuai, dan senantiasa melakukan usaha menggapai hasil yang maksimal menggunakan serta sumber daya yang lain yang ada dengan efisien dan efektif.

Aparat desa merupakan bagian pegawai negeri yang memiliki tuntutan agar bisa menjadi penggerak Pembangunan sebab berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga bisa lebih mengerti kondisi dan keadaan masyarakat. Terutama di era modern ini, kesuksesan atau keberhasilan kinerja sebuah organisasi dipengaruhi oleh sumber daya manusianya, pemimpin, dan bawahan sehingga pengetahuan dan kompetensi pada pengoperasian manajemen kinerja adalah sebuah kebutuhan. Meningkatkan kinerja sebuah organisasi ataupun instansi berkaitan erat dengan kedisiplinan dari para karyawan saat menjalankan tanggung jawab dan tugasnya. Kinerja yang lebih maksimal dan intensif sangat dibutuhkan dari setiap unit organisasi supaya bisa memaksimalkan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan Tingkat ketercapaian hasil bisa diukur sehingga akan bisa didapatkan Gambaran sejauh mana tugas yang sudah diemban melalui tugas dan wewenang yang diberikan bisa dijalankan dengan maksimal dan nyata.

Seorang pemimpin perlu mampu mendeteksi dan memahami aspirasi pegawainya atau bawahannya untuk mendorong kinerja serta rasa tanggung jawab dalam kemajuan atau kemunduran organisasi tempat mereka bekerja. Pada dasarnya, kinerja pegawai bergantung pada dua aspek: sikap pemimpin terhadap bawahan dan sikap pegawai itu sendiri. Dengan demikian,



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

ada hubungan yang sangat erat antara kepemimpinan dan kinerja. Lembaga pemerintah memegang peranan penting dalam menjalankan proses birokrasi demi melayani masyarakat. Dalam masyarakat yang semakin terbuka dan transparan, lembaga pemerintah harus dapat meningkatkan fungsi pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin modern, sehingga mereka dituntut untuk terus mengoptimalkan kualitas dan kemampuan kinerja pegawainya.

Kepemimpinan dalam sebuah organisasi berfungsi sebagai motivasi eksternal yang efektif untuk mencapai baik tujuan individu maupun organisasi. Variasi dalam gaya kepemimpinan dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap kinerja individu dan dinamika kelompok. Sebagai orang yang memengaruhi perilaku orang lain, seorang pemimpin menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari dirinya sendiri, dari pengikutnya, maupun dari situasi yang ada. Untuk mengatasi hal ini, pemimpin perlu menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan konteks dan kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu, pemimpin dituntut untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan lingkungan organisasi. Salah satu bentuk kepemimpinan di sektor publik dapat ditemukan pada tingkat pemerintahan desa, yakni kepemimpinan Kades. Mengacu hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penulisan terkait **“Gaya Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Taja Indah, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin”**.

Pemimpin diartikan dengan sosok yang menggunakan sikap, pengetahuan, karakter dan naluri guna menciptakan keadaan dengan begitu individu lainnya yang dipimpin dapat bekerja sama untuk mewujudkan tujuannya. Perilaku pemimpin dikatakan efektif jika :



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

1. Menjaga sikap positif.
2. Menyampaikan instruksi dengan jelas, tegas, lengkap, dan sesuai.
3. Membangun disiplin dalam bekerja
4. Memberikan masukan untuk perbaikan tugas.
5. Menerima masukan dari staf.
6. Memperkuat rasa kebersamaan,
7. Mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada staf, dan
8. Mengenalkan anggota baru jika ada.

Fungsi Pemimpin

Peran pemimpin dalam sebuah organisasi jelas sangat vital bagi keberlangsungan dan perkembangan organisasi tersebut. Rivai (2002) menyebutkan bahwa secara umum, fungsi kepemimpinan terdiri dari dua aspek utama mencakup:

1. Peran administratif, yaitu merumuskan kebijakan administrasi dan menyediakan sarana yang diperlukan.
2. Peran sebagai manajemen puncak, yaitu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengisian posisi, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan.

Untuk mencapai kepemimpinan yang efektif, penting bagi pemimpin untuk menjalankan perannya sesuai dengan fungsinya. Dalam konteks ini, fungsi kepemimpinan terhubung langsung dengan kondisi sosial yang ada dalam kelompok, yang menunjukkan bahwa setiap pemimpin harus berada di tengah situasi tersebut, bukan di luar. Pemimpin perlu berupaya menjadi bagian dari dinamika sosial kelompok atau organisasinya. Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi mencakup:



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

1. Dimensi yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam mengarahkan tindakan, terlihat dari reaksi orang-orang yang dipimpinnya.
2. Dimensi yang terkait dengan dukungan atau partisipasi orang-orang yang dipimpin dalam menjalankan tugas organisasi, tercermin dalam keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin.

Berkaitan terhadap dua dimensi itu, Nawawi menjelaskan lima fungsi pokok kepemimpinan antara lainn :

1. Fungsi Instruktif

Pemimpin berperan sebagai komunikator yang mengatur isi, cara, waktu, dan tempat pelaksanaan perintah agar keputusan dapat dilaksanakan dengan efektif. Tugas orang yang dipimpin adalah melaksanakan perintah tersebut. Inisiatif terkait perintah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemimpin. Keputusan pemimpin menjadi berarti hanya jika diikuti oleh bawahan; tanpa pelaksanaan, perintah akan sia-sia. Dengan demikian, kemampuan bawahan untuk mendorong pelaksanaan perintah berasal dari keputusan pemimpin. Perintah yang jelas dari pemimpin juga berfungsi sebagai panduan yang dapat meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan pelayanan kepada masyarakat.

2. Fungsi Konsultatif

Pemimpin dapat menerapkan fungsi konsultatif sebagai bentuk komunikasi dua arah untuk menetapkan keputusan yang memerlukan pertimbangan dan konsultasi dengan anggota tim. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan masukan atau umpan balik yang berguna untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan yang telah dibuat dan diimplementasikan.



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

3. Fungsi Partisipasi

Dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berupaya melibatkan anggota tim baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya. Setiap anggota memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam melaksanakan tugas sesuai perannya. Fungsi ini tidak hanya bersifat dua arah, tetapi juga mencerminkan hubungan manusia yang efektif antara pemimpin dan anggota. Meskipun semua memiliki kesempatan yang sama, tindakan harus tetap terarah dan terkoordinasi, menjaga agar setiap orang tidak mengganggu tugas orang lain. Oleh karena itu, musyawarah menjadi krusial dalam partisipasi dalam program organisasi. Pemimpin seharusnya tidak hanya membuat keputusan dan memerintahkan pelaksanaan, tetapi tetap menjalankan fungsi kepemimpinannya, bukan bertindak selaku pelaksana.

4. Fungsi Delegasi

Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan wewenang dan menetapkan keputusan kepada orang lain. Fungsi ini mencerminkan kepercayaan pemimpin kepada mereka yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pendelegasian sangat penting karena kemajuan kelompok tidak dapat dicapai hanya oleh pemimpin sendiri. Jika pemimpin berusaha bekerja sendirian, hasil yang dicapai akan terbatas dan mungkin tidak signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mendelegasikan sebagian wewenang kepada bawahan agar tugas dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

5. Fungsi pengendalian



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Fungsi pengendalian berfokus pada kemampuan pemimpin untuk mengatur efektivitas anggota secara terarah dan terkoordinasi, sehingga tujuan bersama dapat tercapai secara optimal. Pemimpin melaksanakan fungsi ini melalui bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Dengan demikian, pemimpin berusaha mencegah kesalahan individu dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

Semua fungsi kepemimpinan yang disebutkan di atas dilaksanakan dalam kegiatan kepemimpinan secara menyeluruh. Aktivitas kepemimpinan yang integral ini akan berlangsung dengan cara sebagai berikut:

1. Pemimpin bertanggung jawab untuk merinci program kerja yang merupakan keputusan konkret, dengan prioritas yang jelas dan relevan dengan tujuan organisasi.
2. Pimpinan harus mendukung kebebasan berpikir dan berpendapat, baik secara individu maupun dalam kelompok kecil, serta menghargai gagasan dan kritik anggota sebagai bentuk partisipasi. Partisipasi tidak hanya mencakup pelaksanaan perintah, tetapi juga memberikan informasi dan masukan untuk pertimbangan keputusan.
3. Pemimpin harus dapat menerjemahkan keputusan menjadi instruksi yang jelas, disesuaikan dengan kemampuan anggota. Setiap anggota perlu tahu sumber instruksi dan kepada siapa mereka bertanggung jawab.
4. Pemimpin harus membantu anggota dalam mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan sesuai tanggung jawab mereka. Setiap anggota perlu didorong untuk menjadi mandiri dan tidak bergantung pada pemimpin, sehingga mereka bisa bertindak proaktif dan menyadari tanggung jawab mereka.



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

5. Pemimpin perlu membangun kerjasama yang harmonis, memastikan setiap anggota melaksanakan tugasnya dan saling mendukung dalam kegiatan yang memerlukan kolaborasi. Pimpinan harus mengakui dan menghargai kemampuan serta prestasi anggota.

Kesimpulan

Mengacu hasil penelitian dan pembahasan mengenai Gaya kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Taja Indah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin maka kesimpulan yang didapat yakni

1. Gaya kepemimpinan Kepala Desa di Desa Taja Indah, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, menggabungkan pendekatan delegatif dan partisipatif. Dalam pengambilan keputusan, Kepala Desa masih merujuk pada aturan yang telah disepakati sebelumnya. Dukungan untuk gaya ini terlihat dalam pelaksanaan tugas yang tetap mengakomodasi aspirasi masyarakat, dengan tetap mengedepankan musyawarah dan mufakat. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pendekatan ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, yang mungkin disebabkan oleh rendahnya sumber daya yang ada di desa.
2. Dari berbagai jenis kepemimpinan, termasuk Otoriter, Militeristik, Delegative, dan Partisipatif, peneliti menyimpulkan bahwa tipe yang paling sesuai untuk pemerintahan di Desa Taja Indah adalah Delegative dan Partisipatif. Kedua tipe ini efektif dalam memberdayakan masyarakat untuk berargumen dan bertindak demi kepentingan desa. Hal ini penting karena manusia sering kali tidak dapat terhindar dari kesalahan dalam berpikir dan bertindak. Dengan kehadiran kepemimpinan yang delegatif dan partisipatif, diharapkan visi dan misi Desa Taja Indah dapat tercapai. Oleh karena itu, Kepala Desa



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

perlu terbuka terhadap saran dan kritik dari masyarakat untuk mengurangi ego dalam menjalankan kepemimpinannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi & Suwandi, 2008. *Memahami penelitian Kualitatif*, Jakarta.
- Didik dkk, 2016. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Kartohadikoesoemo Soetardjo, 2002. *Menyoal kembali Otonomi Desa*, Yogyakarta.
- Kusnardi, Moh & Ibrahim, Harmaily, 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Sinar Bakti.
- Liliweri, Alo, 2011. *Komunikasi serba ada serba makna*. Kencana, Jakarta.
- Miles, B. Mathew & Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta, UIP.
- Moelong, Lexy, J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: remaja Rosdakerva.
- Soekanto, Soerjono, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memasukkan konsep tentang desentralisasi desa.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.



WIYATA PRAJA

e.Issn no : 2809-3771

Jurnal Ilmu Pemerintahan: Vol.6 No.1 2024

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN